

## LEADERSHIP OF MADRASAH HEAD IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN MADRASAH IBTIDAIYAH SULTAN AGUNG SLEMAN

### (KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH SULTAN AGUNG SLEMAN)

Oleh:

Imam Kahfi<sup>1</sup>, Nyamini<sup>2</sup>, Aulia Diana Devi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>MAN 1 Tulang Bawang Barat, Indonesia

<sup>2</sup>SDN 1 Negeri Besar, Indonesia

<sup>3</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: [imamkahfi04@gmail.com](mailto:imamkahfi04@gmail.com), [maryamnyamini12@gmail.com](mailto:maryamnyamini12@gmail.com),  
[auliadianadevi15@gmail.com](mailto:auliadianadevi15@gmail.com)

#### ABSTRACT

*Good leadership will produce good work output also against an organization that it leads. This research aims to find out the leadership of madrasa heads in improving the quality of education at MI Sultan Agung Sleman. The method used is descriptive analysis using a qualitative approach. The subjects in the study were the head of the MI madrasa Sultan Agung Sleman, and the methods used were observation, interviews and documentation. The results showed that the head of madrasah in advancing the quality of education in MI Sultan Agung, as follows: The head of madrasah always monitors in the learning process to find out the shortcomings or what must be improved from existing standards, both from the way teachers teach, completeness of facilities, and class neatness. The head of the madrasa always conducts an evaluation to correct any problems that must be solved. The head of the madrasa reprimands the teacher when there is one of the teachers who deviates from the rules or tartib in mi Sultan Agung. The head of the madrasa requires all learners before graduating from his madrasa to memorize juz 30 and be able to read and write the Qur'an.*

**Keywords:** *Leadership, Head of Madrasah, Quality of Education.*

#### ABSTRAK

Kepemimpinan yang baik akan menghasilkan output kerja yang baik juga terhadap suatu organisasi yang dipimpinnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Sultan Agung Sleman. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala madrasah MI Sultan Agung Sleman, dan adapun metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah dalam memajukan mutu pendidikan di MI Sultan Agung, sebagai berikut: Kepala madrasah selalu memonitori dalam proses pembelajaran untuk mengetahui kekurangan atau apa saja yang harus diperbaiki dari standar yang sudah ada, baik

dari cara guru mengajar, kelengkapan fasilitas, dan kerapihan kelas. Kepala madrasah selalu mengadakan evaluasi untuk memperbaiki apa saja permasalahan yang harus diselesaikan. Kepala madrasah menegur guru ketika ada salah satu guru yang menyimpang dari peraturan atau tartib yang ada di MI Sultan Agung. Kepala madrasah mewajibkan seluruh peserta didik sebelum lulus dari madrasah nya wajib hafal juz 30 dan bisa membaca dan menulis Al-Qur'an.

**Kata kunci : Kepemimpinan, Kepala Madrasah, Mutu Pendidikan.**

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi individu anak bangsa, telah diakui dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ayat (3) juga menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah sendiri bertanggungjawab mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Hal ini menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 alinea 4. Negara tidak hanya mengamanahkan sebuah kecerdasan intelektual saja, akan tetapi juga kekayaan moral dan budi pekerti setiap warga negaranya juga diwajibkan. Untuk itu perlu adanya sebuah system pendidikan yang baik dan berkualitas di sekolah, terutama sekolah yang berlabel agama (madrasah).

Karena madrasah mempunyai tanggung jawab ganda terhadap peserta didiknya. Madrasah sebagai suatu Lembaga Pendidikan menghadapi dua tuntutan yaitu tuntutan dari masyarakat dan tuntutan dunia usaha. Hal yang menjadi tuntutan yaitu tentang masalah rendahnya mutu pendidikan dan masalah relevansi terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat di era industrialisasi dan globalisasi yang semakin terbuka.<sup>1</sup> Tuntutan yang pertama yakni mengenai mutu pendidikan merupakan hal yang wajib dan harus menjadi prioritas utama. Jika sebuah pendidikan mempunyai mutu yang baik secara otomatis akan mampu menjawab permasalahan, atau tuntutan yang kedua yakni mengenai masalah relevansi terhadap

---

<sup>1</sup> Santoso Budi, "Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Madrasah: Studi Kasus tentang Manajemen Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari Sukoharjo," *dalam Jurnal Pasca UNS* 1, no. 2 (2013): h. 199-213.

sebuah perkembangan kebutuhan masyarakat yang terjadi di era globalisasi dan industrialisasi dewasa ini.

Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Mutu pendidikan merujuk pada sebuah pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu dihasilkan oleh kepemimpinan kepala madrasah bermutu, kepala madrasah bermutu adalah yang professional.

Kepala madrasah professional adalah yang mampu mengelola dan mengembangkan madrasah secara komprehensif (menyeluruh), oleh karena itu kepala madrasah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan madrasah. Kepala madrasah professional dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan strategi-strategi peningkatan mutu, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang bermutu. Profesionalisme kepala madrasah akan menunjukkan mutu kinerja madrasah.<sup>2</sup>

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Begitu luhur dan mulianya bunyi rumusan tujuan pendidikan tersebut yang mampu mengantar bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: “kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana” serta peraturan menteri pendidikan nasional

---

<sup>2</sup> Budi, h. 211.

<sup>3</sup> *Undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005* (Bandung: Fokus Indo Mandiri, 2012), h. 3.

nomor: 13 tahun 2007 tanggal 17 april 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah pasal 1 ayat berbunyi “Untuk diangkat kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional”.<sup>4</sup>

Jika berbicara tentang kepala madrasah akan muncul pembahasan tentang sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam sebuah sekolah merupakan hal yang sangat urgen yang harus dilakukan seorang kepala sekolah atau madrasah. Hal ini dikarenakan kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi, keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan seorang pemimpin dalam menjalankan organisasinya. Kepemimpinan lebih tertuju pada gaya seorang pemimpin dalam memimpin.

Menurut E Mulyasa kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor (EMAS).<sup>5</sup> Dalam perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai leader, innovator, motivator, dan entrepreneur disekolahnya. Dengan demikian dalam paradigm baru manajemen pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, motivator.

Mutu sekolah sebagai salah satu indikator untuk melihat produktivitas dan erat hubungannya dengan masalah pengelolaan atau manajemen pada sekolah. Hal ini dapat di kaitkan dengan pernyataan “kegagalan mutu dalam suatu organisasi disebabkan oleh kelemahan manajemen”.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan sebagai kepala madrasah banyak faktor penghambat tercapainya kualitas kepemimpinan kepala madrasah jika dilihat dari rendahnya kinerja kepala madrasah. Berdasarkan pengalaman empirik menunjukkan bahwa rata-rata kepala madrasah kurang memiliki kemampuan akademik, kurang memiliki motivasi diri, kurang semangat dan disiplin kerja, serta memiliki wawasan yang sempit. Fenomena ini disebabkan karena faktor proses penyaringan kurang memenuhi kompetensi, kurang prosedural, kurang transparan, tidak kompetitif serta

---

<sup>4</sup> Undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005, h. 23.

<sup>5</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 98.

<sup>6</sup> Muhammad Zulfahmi Akbar, “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Man 2 Bima,” *Jurnal El-Hikam* 14, no. 1 (26 Juni 2021): 158–87.

faktor-faktor internal kepala madrasah dapat menjadi penghambat tumbuh kembangnya menjadi kepala madrasah yang profesional.

Rendahnya profesional berdampak rendahnya produktifitas kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.<sup>7</sup> Studi keberhasilan kepala madrasah dalam memimpin lembaga sekolah menunjukkan bahwa kepala madrasah adalah seorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu madrasah. Kepala madrasah selaku top leader mempunyai wewenang dan kekuasaan serta strategi kepemimpinan yang efektif untuk mengatur dan mengembangkan bawah-bawahannya secara profesional. Lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan madrasah adalah keberhasilan kepala madrasah.

Dalam hal ini kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun istilah kepala sekolah berasal dari dua kata kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin. Sedangkan sekolah diartikan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat aktivitas belajar mengajar. Sekolah juga merupakan lingkungan hidup sesudah rumah, di mana anak tinggal beberapa jam, tempat tinggal anak yang pada umumnya pada masa perkembangan, dan lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi mempersiapkan anak untuk menghadapi hidup.<sup>8</sup>

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan perlu memiliki wawasan kedepan. Menurut Soebagio kepemimpinan pendidikan memerlukan perhatian yang utama, karena melalui kepemimpinan yang baik akan lahir tenaga-tenaga berkualitas dalam berbagai bidang sebagai pemikir, pekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal yang terpenting bahwa melalui pendidikan kita menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil, berkualitas, dan tenaga yang siap pakai memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dan industri serta masyarakat lainnya.<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun

---

<sup>7</sup> Akbar, 87.

<sup>8</sup> Siti Munawaroh, "Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di SDN Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar," *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 7, no. 1 (20 Mei 2017), h. 373.

<sup>9</sup> Nasib Tua Lumban Gaol, "Sejarah Dan Konsep Manajemen Pendidikan," *Jurnal Dinamika Pendidikan* 13, no. 1 (24 April 2020): h. 161.

pendekatan penelitian kualitatif sendiri merupakan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah kita sebagai manusia.<sup>10</sup> Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, dengan meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dengan mengambil tema mutu pendidikan di MI Sultan Agung, Sleman-Yogyakarta.<sup>11</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah kepala madrasah nya sendiri, dan adapun metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dengan harapannya bisa memberikan sedikit informasi mengenai mutu dalam pendidikan yang ada di MI Sultan Agung.

Penelitian ini dilakukan di MI Sultan Agung yang berada dikabupaten Sleman, tepatnya di Jln. Kaliurang Km. 7 Babadan Baru, Condong Catur, Depok-Sleman, Yogyakarta 55283. Sedikit informasi tambahan bahwa MI Sultan Agung atau yang biasa disebut dengan MISA ini adalah salah satu madrasah swasta yang ada di kabupaten sleman, dengan memiliki akreditasi A (Amat Baik), dengan status memiliki bangunan sendiri yang dibawah yayasan Sultan Agung itu sendiri dengan naungan keseluruhan pembelejarannya diadopsi dari Kemendikbud dan Kemenag, dan yang terakhir pemilihan kepala madrasah di MI Sultan Agung sendiri dipilih langsung oleh seluiruh guru yang mengajar di madrasah tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan (*leadership*) berasal dari kata Leader artinya pemimpin atau to lead artinya memimpin.<sup>12</sup> Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

<sup>11</sup> Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Research and Development (R&D)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

<sup>12</sup> Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi* (Malang: Aditya Media Publishing, 2012), h. 37.

<sup>13</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional: Panduan Quality Control bagi Para Pelaku Lembaga Pendidikan," *Yogyakarta: Diva Press, hlm 95* (2009).

Sedangkan menurut Koontz dan Donnel, kepemimpinan adalah suatu seni dan proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok.<sup>14</sup>

Menurut Stogdill, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka pemuasan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok.<sup>15</sup>

Maka dapat diketahui bahwa pengertian kepemimpinan pada hakekatnya adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu.

Peranan kepala sekolah dalam memimpin sekolah menjadi sangat penting terutama dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan yang dibangun. Sebagai pemimpin tunggal, kepala sekolah merupakan salah satu factor penentu yang dapat mendorong sekolah mewujudkan visi, misi, tujuan dan sarana melalui berbagai program yang dilaksanakan secara terencana. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh, sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan secara tepat, di samping memiliki sikap prakarsa yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikannya.

Kepala sekolah mempunyai dua peranan utama, pertama sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan kedua memberikan pimpinan dalam manajemen. Untuk mengetahui peranan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan diantaranya dapat dinilai melalui peranan kepala sekolah sebagai edukator, manajer, dan supervisor. Sebagai edukator kepala sekolah harus dapat menjadi teladan dalam hal kemampuan mendidik siswa dari para guru.

Kepala sekolah disamping mampu menjadi guru pendidik yang baik bagi siswa, juga harus dapat menjadi pendidik bagi dewan guru. Dengan kata lain, kepala sekolah harus mampu meningkatkan kemampuan mengajar para guru yang menjadi staf pengajar dilingkungannya. Tugas manajer pendidikan adalah merencanakan

---

<sup>14</sup> Asmani, h. 112.

<sup>15</sup> Abdul Basyar, "Pentingnya Peran Pemimpin Dalam Permasalahan Sosial," *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 01 (10 Januari 2017): 1–16.

sesuatu atau mencari strategi yang terbaik, mengorganisasi dan mengkoordinasi sumber-sumber pendidikan yang masih berserakan agar menyatu dalam melaksanakan pendidikan, dan mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan.

Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, karena atas peranannya sebagai manajer di sekolah dituntut untuk mampu : (1) mengadakan prediksi masa depan sekolah, misalnya tentang kualitas yang diinginkan masyarakat, (2) melakukan inovasi dengan mengambil inisiatif dan kegiatan- kegiatan yang kreatif untuk kemajuan sekolah, (3) menciptakan strategi atau kebijakan untuk mensukseskan pikiran-pikiran yang inovatif tersebut, (4) menyusun perencanaan, baik perencanaan strategis maupun perencanaan operasional, (5) menemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan, (6) melakukan pengendalian atau kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan dan hasilnya. Supervisi merupakan kegiatan membina dan dengan membantu pertumbuhan agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesinya.

### **Tipe-tipe Kepemimpinan**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, yaitu menggerakkan atau memberi motivasi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang selalu terarah pada pencapaian tujuan organisasi, berbagai cara dapat dilakukan oleh seseorang pemimpin. Cara itu mencerminkan sikap dan pandangan pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya. Yang memberikan gambaran pula tentang bentuk (tipe) kepemimpinannya yang dijalankannya. Adapun tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yang pokok itu ada tiga yaitu otokratis, laissez faire, dan demokratis.<sup>16</sup>

#### **1. Tipe Otokrasi atau Otoriter**

Otokrasi berasal dari kata oto yang berarti sendiri dan kratos berarti pemerintah. Jadi otokrasi adalah mempunyai pemerintah dan menentukan sendiri. Otokrasi merupakan Pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang berkuasa secara penuh dan tidak terbatas masanya. Sedangkan yang memegang kekuasaan di sebut otokrat yang biasanya di jabat oleh pemimpin yang

---

<sup>16</sup> imam Taulabi, "Kepemimpinan Sosial Dalam Pendidikan," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 23, no. 2 (2012), h. 22.



berstatus sebagai raja atau yang menggunakan sistem kerajaan.<sup>17</sup> Sedangkan di lingkungan sekolah bukan raja yang menjadi pemimpin akan tetapi kepala sekolah yang memiliki gaya seperti raja yang berkuasa mutlak dan sentral dalam menentukan kebijaksanaan sekolah.

Kepala sekolah yang otoriter biasanya tidak terbuka, tidak mau menerima kritik, dan tidak membuka jalan untuk berinteraksi dengan tenaga pendidikan. Ia hanya memberikan interuksi tentang apa yang harus dikerjakan serta dalam menanamkan disiplin cenderung menggunakan paksaan dan hukuman.<sup>18</sup> Kepala sekolah yang otoriter berkeyakinan bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, menganggap dirinya sebagai orang yang paling berkuasa, dan paling mengetahui berbagai hal. Ketika dalam rapat sekolah pun ia menentukan berbagai kegiatan secara otoriter, dan yang sangat dominan dalam memutuskan apa yang akan dilakukan oleh sekolah. Para tenaga pendidikan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pandangan, pendapat maupun saran.

Mereka dipandang sebagai alat untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Pada situasi kepemimpinan pendidikan seperti ini dapat di bayangkan suasana kerja yang berlangsung di dalam kelompok tersebut bagaimana hubungan-hubungan kemanusiaan yang berlangsung dan bagaimana konflik-konflik antara pemimpin dan bawahan-bawahan dan antara anggota-anggota staff kerja itu sendiri.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Leppit seorang ahli kepemimpinan berkesimpulan bahwa konflik-konflik dan sikap-sikap atau tindakan agresif yang terjadi dalam suatu lembaga di bawah pemimpin seorang pemimpin otoriter kurang lebih 30 kali sebanyak yang timbul dari pada dalam suasana kerja yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang demokratis.<sup>19</sup>

Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini umumnya merasa menang sendiri karena mempunyai keyakinan ia tahu apa yang harus dilakukannya dan merasa jalan pikirannya paling benar. Dalam situasi kerja sama, ia berusaha mengambil peran sebagai pengambil keputusan dan mengharapkan orang lain

---

<sup>17</sup> Bakar, A. A., *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 291.

<sup>18</sup> Bakar, A. A., h. 292.

<sup>19</sup> Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*, h. 37.

mendukung ide dan gagasannya, Ia tidak ingin dibantu apalagi dalam menentukan apa yang seharusnya ia lakukan.<sup>20</sup> Tipe otokrasi ini apabila diterapkan dalam dunia pendidikan tidak tepat karena dalam dunia pendidikan, kritik saran dan pendapat orang lain itu sangat perlu untuk diperhatikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan.

## 2. Tipe Laissez-Faire

Kepala sekolah sebagai pemimpin bertipe laissez-faire menghendaki semua komponen pelaku pendidikan menjalankan tugasnya dengan bebas. Oleh karena itu tipe kepemimpinan bebas merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan diserahkan pada bawahan. Karena arti laissez sendiri secara harfiah adalah mengizinkan dan faire adalah bebas. Sehingga dapat diketahui bahwa pengertian laissez-faire adalah memberikan kepada orang lain dengan prinsip kebebasan, termasuk bawahan untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai dengan kehendak bawahan dan tipe ini dapat dilaksanakan di sekolah yang memang benar-benar mempunyai sumber daya manusia maupun alamnya dengan baik dan mampu merancang semua kebutuhan sekolah dengan mandiri.<sup>21</sup>

Pemimpin laissez-faire merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratis, dan sering disebut liberal, karena ia memberikan banyak kebebasan kepada para tenaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah sendiri dalam menghadapi sesuatu.<sup>23</sup> Jika pemimpin otokratis mendominasi, maka tipe pemimpin laissez-faire ini menyerahkan persoalan sepenuhnya pada anggota. Pada tipe kepemimpinan laissez-faire ini sang pemimpin praktis tidak memimpin, sebab ia membiarkan kelompoknya berbuat semau sendiri.<sup>22</sup>

Dalam rapat sekolah, kepala sekolah menyerahkan segala sesuatu kepada para tenaga kependidikan, baik penentuan tujuan, prosedur pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan.

---

<sup>20</sup> Mardiyah, h. 113.

<sup>21</sup> Nurul Mardhotillah, "Strategi Laissez Faire Dalam Mengembangkan Tahfidz Al-Qur'an Di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Sukodono Lumajang," *Khazanah: Jurnal Edukasi* 2, no. 2 (15 September 2020): h. 148–72.

<sup>22</sup> Hanifah dan Zainal Arifin, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transpormasional, Transaksional Dan Laissez Faire Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Pemerintahan Kota Banjarmasin," *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan* 6, no. 2 (1 Maret 2017): h. 234.

Kepala sekolah bersifat pasif, tidak ikut terlibat langsung dengan tenaga pendidikan, dan tidak mengambil inisiatif apapun. Kepala sekolah yang memiliki *laissez-faire* biasanya memosisikan diri sebagai penonton, meskipun ia berada ditengah-tengah para tenaga pendidikan dalam rapat sekolah, karena ia menganggap pemimpin jangan terlalu banyak mengemukakan pendapat, agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota.<sup>23</sup>

Dalam suasana kerja yang dihasilkan oleh kepemimpinan pendidikan semacam itu, tidak dapat dihindarkan timbulnya berbagai ekses negatif, misalnya berupa konflik-konflik kesimpang siuran kerja dan kesewenang-wenangan oleh karena masing-masing individu mempunyai kehendak yang berbeda-beda menuntut untuk dilaksanakan sehingga akibatnya masing-masing adu argumentasi, adu kekuasaan dan adu kekuatan serta persaingan yang kurang sehat diantara anggota disamping itu karena pemimpin sama sekali tidak berperan menyatukan, mengarahkan, mengkoordinir serta menggerakkan anggotanya.<sup>24</sup>

### 3. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah yang berusaha memanfaatkan setiap orang untuk kepentingan kemajuan dan perkembangan organisasi. Saran-saran, pendapat-pendapat dan kritik-kritik setiap anggota disalurkan dengan sebaik-baiknya dan diusahakan memanfaatkannya bagi pertumbuhan dan kemajuan organisasi sebagai perwujudan tanggung jawab bersama.

Dari ayat di atas disebutkan bahwasannya kita diperintahkan untuk melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini mengingat bahwa didalam musyawarah silang pendapat selalu terbuka. Apalagi jika orang-orang yang terlibat terdiri dari banyak orang. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk bersikap tenang dan hati-hati yaitu dengan memperhatikan setiap pendapat, kemudian mentarjihkan suatu pendapat dengan pendapat lain yang lebih banyak maslahat dan faidahnya bagi kepentingan bersama dengan segala kemampuan yang ada.

---

<sup>23</sup> Hidayatus Syarifah, "Pendidikan Dalam Keluarga," *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 2, no. 1 (17 Juni 2017): h. 111–28.

<sup>24</sup> Joonner Rambe dan Isnaria Isnaria, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Yang Berimplikasi Pada Kinerja Karyawan Di Pt. Maschil Sukses Makmur (New Vision)," *Jurnal Manajemen FE-UB* 6, no. 1A (8 Juli 2020): h. 53–71.

Berdasarkan ayat di atas, tepat sekali apabila kepemimpinan demokratis itu diterapkan dalam lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan dalam kepemimpinan demokrasi ini setiap personal dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan misi kedewasaan anak.

### **Mutu Pendidikan**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf/derajat (kepandaian, kecerdasan). Pendidikan adalah perbuatan mendidik jadi secara etimologi mutu pendidikan adalah kualitas perbuatan mendidik, perbuatan disini adalah interaksi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar di kelas. Istilah mutu menurut ISO 2000 dalam Erfi Ilyas, “mutu adalah totalitas karakteristik suatu produk (barang dan jasa) yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan”.<sup>25</sup>

Menurut Rohiat “Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat” sedangkan dalam konteks pendidikan menurut Rohiat, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.<sup>26</sup>

Dari beberapa mutu yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan system pendidikan dalam mempersiapkan, mengolah dan memproses pendidikan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan out put yang berkualitas.

Out put yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu juga harus mampu memenuhi kebutuhan stakholders seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa sebagai berikut: Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan).<sup>27</sup>

Jadi mutu pendidikan bukanlah satu konsep yang berdiri sendiri melainkan

---

<sup>25</sup> Nur Maulida Utu dan Beny Sintasari, “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Mts Miftahul Ulum Cermenan Jombang,” *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 1, no. 1 (28 Maret 2021): h. 25–42.

<sup>26</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 28.

<sup>27</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, h. 226.

terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus bias menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang bermutu juga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang bukan hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki prestasi non akademik, mampu menjadi pelopor perubahan dan mampu dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, baik itu masa sekarang atau masa yang akan datang serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IX menerangkan bahwa standar mutu pendidikan nasional terdiri atas:

#### 1. Standar Isi

Standar isi berkaitan dengan lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi berisi kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, serta kalender pendidikan. Suatu satuan pendidikan dikatakan bermutu jika semua aspek-aspek yang ada pada standar isi kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, serta kalender pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.

#### 2. Standar Proses

Standar proses berkaitan dengan standar pendidikan nasional yaitu pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan guna mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses berisi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar serta pengawasan dari proses pembelajaran. Suatu satuan pendidikan dikatakan bermutu jika peserta didik pada satuan pendidikan tersebut mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan prosesnya efektif sehingga hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik tersebut dari segi kognitif, afektif dan psikomotor maksimal.

#### 3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan berkaitan dengan kualifikasi kemampuan lulusan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Suatu satuan pendidikan, khususnya

pendidikan dasar SD/MI dikatakan bermutu jika:

- a. Dari segi kognitif yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya serta mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara.
- b. Dari segi afektif yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak, jujur, dan peduli, bertanggungjawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani yang semuanya disesuaikan dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.
- c. Dari segi psikomotor yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.

#### 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan dengan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Suatu satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar yaitu SD/MI dikatakan bermutu jika : (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI , kependidikan lain, atau psikologi, (c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

#### 5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana berkaitan dengan kriteria minimal mengenai ruang belajar, tempat olah raga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, ruang praktek kerja,tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran serta teknologi informasi dan komunikasi. Suatu lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika sarana dan prasarana yang ada pada suatu satuan pendidikan tu sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

#### 6. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan satuan pendidikan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada aspek-aspek Kurikulum dan silabus, kalender pendidikan dan akademi, struktur organisasi satuan pendidikan, pembagian tugas diantara pendidik, pembagian tugas diantara tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat, biaya operasional satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan dikatakan bermutu jika agar semua aspek yang dikelola, terkelola secara baik sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

#### 7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar pembiayaan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Suatu satuan pendidikan dikatakan bermutu jika semua komponen pada standar pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

#### 8. Standar Penilaian

Standar penilaian berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Suatu satuan pendidikan dikatakan bermutu jika mekanisme, prosedur dan instrument hasil belajar peserta didik dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Secara umum satuan pendidikan dikatakan bermutu jika 8 standar yang telah tercantum diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat pemerintah.

Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung merupakan madrasah yang sudah lama berdiri, terhitung dari tahun 1967, yang pada mulanya dikenal sebagai madrasah diniyah, setelah berjalan kurang lebih 2 tahun banyak masyarakat sekitar yang mengusulkan untuk dijadikan sekolah pagi, lalu akhirnya yayasan atau dari pihak sultan agung pun memikirkan atas aspirasi-aspirasi dari masyarakat sekitar, dan pada

akhirnya alhamdulillah dapat terealisasi untuk menjadi madrasah ibtidaiyah yang secara tidak lama mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan SK No.03/KPTS/1969 tercatat pada tanggal 2 Januari 1969 diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun hasil wawancara yang didapat melalui kepala madrasah MI Sultan Agung sendiri mengenai mutu pendidikan, meliputi seperti pembahasan dari tepat waktunya masuk untuk memulai proses KBM, proses pembelajaran di MI Sultan Agung, serta cara menangani permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan dalam mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi, baik itu dengan guru ataupun dengan peserta didik dengan tidak lupa melibatkan wali siswa didalamnya.

Berikut beberapa cara kepala madrasah untuk memajukan mutu pendidikan di MI Sultan Agung, sebagai berikut :

- a. Kepala madrasah selalu memonitori setiap harinya dalam proses pembelajaran dari setiap kelas dalam setiap minggunya, dengan seperti itu kepala madrasah mengetahui kekurangan atau apa saja yang harus diperbaiki dari standar yang sudah ada, baik dari cara guru mengajar, kelengkapan fasilitas, dan kerapihan kelas.
- b. Kepala madrasah selalu mengadakan evaluasi setiap minggunya untuk memperbaiki apa saja permasalahan yang harus diselesaikan selama satu minggu itu.
- c. Kepala madrasah langsung menegur guru tersebut ketika ada salah satu guru yang menyimpang dari peraturan atau tartib yang ada di MI Sultan Agung.
- d. Kepala madrasah mewajibkan seluruh peserta didik sebelum lulus dari madrasah nya wajib hafal juz 30 dan bisa membaca dan menulis al-qur'an.

Berikut beberapa program unggulan di MI Sultan Agung sendiri seperti penerapan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk karakter peserta didik seperti pembiasaan untuk memberikan salam apabila bertemu guru, pembiasaan melakukan sholat dhuha di pagi hari sebelum proses KBM dimulai serta adanya program baca tulis al qur'an sejak dini. Hal itu tentu saja harus dibiasakan sejak dari kelas rendah hingga kelas tinggi sehingga nantinya akan menciptakan lulusan yang berkualitas dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena kepala MI Sultan Agung sendiri sudah memastikan bahwa setiap lulusan dari madrasah ini juga harus bisa membaca Al



Qur'an serta minimal hafal juz 30 itu wajib sebagai persyaratan lulus di MI Sultan Agung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas bahwa kepemimpinan adalah suatu seni dan proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Kepala madrasah dalam memajukan mutu pendidikan di MI Sultan Agung, sebagai berikut: Kepala madrasah selalu memonitori dalam proses pembelajaran untuk mengetahui kekurangan atau apa saja yang harus diperbaiki dari standar yang sudah ada, baik dari cara guru mengajar, kelengkapan fasilitas, dan kerapihan kelas. Kepala madrasah selalu mengadakan evaluasi untuk memperbaiki apa saja permasalahan yang harus diselesaikan. Kepala madrasah menegur guru ketika ada salah satu guru yang menyimpang dari peraturan atau tartib yang ada di MI Sultan Agung. Kepala madrasah mewajibkan seluruh peserta didik sebelum lulus dari madrasah nya wajib hafal juz 30 dan bisa membaca dan menulis Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Zulfahmi. "Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Man 2 Bima." *Jurnal El-Hikam* 14, no. 1 (26 Juni 2021): 158–87.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2009. "Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional: Panduan Quality Control bagi Para Pelaku Lembaga Pendidikan." *Yogyakarta: Diva Press*.
- Bakar, A. A. 2009. *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.
- Basyar, Abdul. "Pentingnya Peran Pemimpin Dalam Permasalahan Sosial." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 01 (10 Januari 2017): 1–16.
- Budi, Santoso. "Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Madrasah: Studi Kasus tentang Manajemen Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari Sukoharjo." *dalam Jurnal Pasca UNS* 1, no. 2 (2013).
- E. Mulyasa. 2006. *Menjadi Kepala Sekolah Professional*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Endang Widi Winarni. 2018. *Teori dan Praktik: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Research and Development (R&D)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gaol, Nasib Tua Lumban. "Sejarah Dan Konsep Manajemen Pendidikan." *Jurnal Dinamika Pendidikan* 13, no. 1 (24 April 2020): 79–88.

- Hanifah, dan Zainal Arifin. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transpormasional, Transaksional Dan Laissez Faire Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Pemerintahan Kota Banjarmasin.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan* 6, no. 2 (1 Maret 2017).
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardhotillah, Nurul. “Strategi Laissez Faire Dalam Mengembangkan Tahfidz Al-Qur’an Di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Sukodono Lumajang.” *Khazanah: Jurnal Edukasi* 2, no. 2 (15 September 2020): 148–72.
- Mardiyah. 2012. *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Munawaroh, Siti. “Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di SDN Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.” *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 7, no. 1 (20 Mei 2017).
- Rambe, Joonner, dan Isnaria Isnaria. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Yang Berimplikasi Pada Kinerja Karyawan Di PT. Maschil Sukses Makmur (New Vision).” *Jurnal Manajemen Fe-Ub* 6, no. 1A (8 Juli 2020): 53–71.
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah*. Bandung: Refika Aditama.
- Syarifah, Hidayatus. “Pendidikan Dalam Keluarga.” *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 2, no. 1 (17 Juni 2017): 111–28.
- Taulabi, Imam. “Kepemimpinan Sosial Dalam Pendidikan.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 23, no. 2 (2012).
- Undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional No 19 tahun 2005*. Bandung: Fokus Indo Mandiri, 2012.
- Utu, Nur Maulida, dan Beny Sintasari. “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di MTs Miftahul Ulum Cermenan Jombang.” *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 1, no. 1 (28 Maret 2021): 25–42.